

BAB II

TIJAUAN PUSTAKA

1.1 Penyelenggaraan Pembelajaran Dimasa Pandemi Covid-19

Wabah covid-19, merupakan wabah yang tidak hanya menyerang Indonesia namun juga menyerang dunia. Krisis kesehatan menjadi polemik diberbagai sektor salah satu hal yang paling berbahaya dari wabah ini adalah aktivitas penyebaran covid-19 yang begitu cepat ditengah aktivitas sosial masyarakat, baik dengan sedikit sentuhan ataupun bicara yang dibawa melalui percikan ludah si penderita ataupun *carrier virus corona*. Oleh karena itu dalam upaya menekan penyebaran virus corona maka pemerintah mengambil kebijakan lockdown diberbagai daerah.

Dampak dari penyebaran covid-19 adalah proses pembelajaran akan terus dilakukan dari rumah atau yang disebut juga dengan *study from home*.¹ Salah satu alternative yang bisa dilakukan agar proses pembelajaran tetap berjalan adalah dengan melakukan pembelajaran secara daring (dalam jaringan). Dengan adanya pembelajaran daring siswa akan tetap bisa belajar walaupun tidak dilakukan tatap muka langsung di dalam ruangan kelas. Namun demikian pelaksanaan pembelajaran secara daring, tentu akan menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi dunia pendidikan. Daring atau full online merupakan sebuah paradigma baru bagi

dunia pendidikan yang tentunya membutuhkan adaptasi yang tidak mudah tidak hanya bagi siswa/siswi namun juga bagi tenaga pendidik.

¹ Dina alfiana ikhwani, strategi pembelajaran efektif masa pandemi covid-19, media sains Indonesia: Jakarta, 2021, hlm 2.

Berbagai perubahan dalam fasilitas pembelajaran terjadi seperti kebutuhan akses dan kuota internet, kesediaan *gadget*, serta ketersediaan berbagai media pembelajaran yang menjadi modal dasar dalam pembelajaran daring.

Adapun karena kondisi pandemi covid-19, terdapat berbagai kebijakan dalam dunia pendidikan terutama adanya *fleksibilitas* dan implementasi kurikulum. Untuk menekan penyebaran covid-19, pemerintah Indonesia khususnya kemendikbud menerapkan kebijakan konsep merdeka dalam penyesuaian kurikulum dimasa pandemi oleh setiap sekolah. Setiap institusi pendidikan dapat memilih materi esensial yang menjadi inti yang harus dicapai tetap sesuai dengan kondisi masing-masing pada tiap daerah serta kemajuan teknologi yang ada.

Pada dasarnya jika digunakan secara bijak dan tepat sasaran metode pembelajaran secara daring adalah solusinya. Dalam rangka memutus rantai penyebaran covid-19 pembelajaran daring dapat menjadi *best solution* peserta didik tetap bisa belajar tanpa harus berkumpul diruang kelas. Siswa akan memiliki waktu dan ruang yang lebih bebas dan luas dalam belajar. Dengan kondisi itu, siswa harusnya merasa lebih aman dan nyaman dalam melakukan pembelajaran yang *fleksibel* dan akses yang lebih mudah.

2.2 Pengertian Sistem Pendukung Keputusan

Sistem merupakan kumpulan sub-sub sistem (elemen) yang saling terkoreksi satu dengan yang lain nya untuk mencapai tujuan tertentu. ²Pengambilan keputusan ialah proses memilih sesuatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi, Proses ini

²Lita Asyrianti Latif, Dkk, *Sistem Pendukung Keputusan Teori dan Implementasi*, Deepublish : Yogyakarta,2018,Hlm 1.

untuk menemukan dan menyelesaikan masalah organisasi. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan memilih alternatif terbaik diantara beberapa alternatif yang ada.

Pernyataan ini menegaskan bahwa mengambil keputusan memerlukan satu seri tindakan dan beberapa langkah. Dapat saja langkah-langkah tersebut ada dalam pikiran seseorang yang sekaligus mengajaknya berpikir sistematis. Dalam dunia manajemen, proses atau seri tindakan itu lebih banyak tampak dalam kegiatan diskusi. Seiring dengan hal tersebut, proses pembuatan sebuah kebijakan publik melibatkan berbagai aktifitas yang kompleks. Pemahaman terhadap proses pembuatan kebijakan oleh para ahli dipandang penenting dalam upaya melakukan penilaian terhadap sebuah kebijakan publik. Untuk membantu melakukan hal ini, para ahli kemudian mengembangkan sejumlah kerangka untuk memahami proses kebijakan (*Policy Process*) atau seringkali disebut juga sebagai siklus kebijakan (*Policy Cycles*)

Menurut Michael Scoot Martoon Konsep sistem pendukung keputusan (SPK) dengan istilah *Managent Decision System*.³ Kemudian sejumlah perusahaan, lembaga penelitian dan perguruan tinggi mulai melakukan penelitian dan membangun sistem pendukung keputusan, sehingga dari produksi yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa sistem ini merupakan suatu sistem berbasis komputer yang ditunjukan untuk membantu pengambilan keputusan dalam memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang tidak terstruktur.

Menurut Little Sistem Pendukung Keputusan ialah sebagai suatu informasi berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen

³ Michael Scoot Martoon dalam Diana, *Metode dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan*, Deepublish:Yogyakarta:2018,Hlm 18.

menangani berbagai permasalahan yang terstruktur maupun tidak terstruktur dengan menggunakan data dan model.⁴

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sitem pendukung keputusan adalah suatu sistem informasi spesifik yang ditunjukkan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang bersifat semi terstruktur. Sistem ini memiliki fasilitas untuk menghasilkan berbagai alternatif yang secara interaktif digunakan oleh pemakai.

Sistem pendukung keputusan ini lebih ditekankan untuk menyelesaikan masalah yang terstruktur, selanjutnya masalah yang tidak terstruktur merupakan bagian dari keahlian pengambil keputusan.

Data-data diambil dari kegiatan sehari-hari yang dilakukan dapat diselesaikan dengan suatu model tertentu sehingga dapat membantu manajemen mengambil keputusan. Kebutuhan akan informasi yang akurat, kebutuhan akan informasi yang terbaru dan *up to date*, penyediaan informasi yang tepat waktu, pengurangan biaya, adanya kebutuhan tentang sistem yang mudah digunakan karena adanya perubahan perilaku pengguna akhir (*end user*) merupakan alasan-alasan yang membuat sistem pendukung keputusan merupakan sistem yang dibutuhkan.

2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar operasional prosedur atau biasa disingkat dengan SOP, pada dasarnya menerapkan perwujudan pengaturan terhadap tahapan proses kerja tertentu dalam organisasi yang bersifat rutin, tetap, dan tidak berubah, yang dibakukan pada dokumen secara tertulis. Menurut syamsi, prosedur merupakan pola tetap dalam suatu rangkaian metode dalam

⁴ Little Dalam Julio Warmansyah, *Metode Penelitian Dan Pengelolaan Data Untuk Pengambilan Keputusan Perusahaan*, Deepublish: Yogyakarta, 2020, Hlm 113.

menjalankan suatu pekerjaan tanpa terkecuali. Bila dikaitkan dengan perkantoran, prosedur atau sistem menerapkan langkah-langkah dalam pekerjaan melalui penerapan dimana, apa, siapa, bilamana, dan bagaimana cara melakukannya.⁵

Melalui Standar operasional prosedur, organisasi dapat mengantisipasi berbagai kondisi dan situasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga walaupun terlihat sederhana, sangat penting menerapkan standar operasional prosedur. Tujuannya adalah agar dapat membentuk komitmen diantara satuan unit kerja dalam organisasi publik, yaitu pemerintah dalam mewujudkan tata kelola

pemerintah yang baik dan memberikan arahan yang sesuai bagi para pegawai dalam melaksanakan tugas nya. Selain itu, juga untuk mengetahui lingkup deskripsi pekerjaanya sehingga kinerja pemerintah dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari tugas yang tumpang tindih.

Standar operasional prosedur (SOP) dalam organisasi terbagi dalam berbagai bidang, diantaranya:

1. Bidang keterkaitan penuh dalam pelayanan jual beli
2. Bidang menangani calon klien
3. Bidang keuangan
4. Bidang terhadap pekerjaan proyek
5. Bidang terhadap pengendalian kualitas

Manfaat standar operasional prosedur diantara nya:

1. Mengurangi kessalahan pada saat menjalankan aktivitas pekerjaan

⁵ Muhafidin didin, yadiman. *dimensi kebijakan publik*. Yogyakarta, andi anggota IKAPI, hal-13

2. Membantu organisasi dalam melakukan evaluasi terhadap setiap proses operasional yang ada
3. Memberikan kejelasan terhadap hubungan antara proses kerja yang satu dengan yang lainnya
4. Memberikan kejelasan yang berkaitan dengan tanggung jawab dan prosedur kerja terhadap proses yang bersangkutan dalam organisasi
5. Memberikan kejelasan yang lebih terhadap setiap peran dan posisi internal organisasi
6. Menjaga keselarasan dalam melaksanakan prosedur kerja

Adapun fungsi pentingnya standar operasional prosedur di antaranya:

1. Dapat melihat kewenangan dan fungsi pemegang jabatan yang disahkan
2. Dapat memahami alur atau metode pekerjaan yang harus diterapkan
3. Dapat memahami berbagai tingkatan terhadap kompleksitas dan kesulitan terhadap suatu pekerjaan dalam mencapai target organisasi.

2.4 Surat Keputusan Bersama

Surat keputusan merupakan sebuah surat atau ketetapan yang dibuat oleh badan atau perusahaan tertentu dalam bentuk tertulis berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur.⁶ Surat keputusan bersifat konkret, individual dan final oleh karena itu, dalam prosesnya pembuatan keputusan langsung ditunjukkan kepada pihak yang dimaksud dan tidak disebarkan secara umum.

Keputusan bersama adalah kebijakan (*beleid*) pemerintah, yang oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung, dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak dapat diadili. Surat keputusan bersama (SKB) menteri, aturan ini merupakan salah satu bentuk peraturan sebagaimana

⁶ Delevoper, surat keputusan: pengertian, contoh, dan cara membuat. <https://www.sipas.id/surat-keputusan/>. Pada tanggal 6 november pukul 20.05.

dinyatakan UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8 (1) yang dibentuk oleh dua atau lebih kementerian untuk mengatur hal yang sama namun sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing kementerian dalam menjalankan urusan dalam pemerintahan.

Dalam hal surat keputusan bersama yang dikeluarkan oleh menteri, menteri juga mempunyai kewenangan untuk membuat aturan kebijakan yang tidak didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan tetapi berdasarkan kepada kewenangan diskresi asalkan kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sehingga surat keputusan bersama menteri mempunyai kedudukan yang sama dengan peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dibentuk berdasarkan kewenangan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

2.5 Surat Edaran

Surat edaran adalah surat yang berisikan penjelasan atau pesan mengenai sesuatu yang bersifat resmi didalam sebuah instansi atau lembaga.⁷ Didalam surat ini biasanya berisi penjelasan tentang suatu hal seperti: kebijakan baru dari instansi, suatu peraturan baru, dan lain sebagainya. Peruntukan surat edaran biasanya tertuju pada ruang lingkup tertentu, seperti surat dari kepala sekolah untuk staf guru, dari rektor untuk para dosen, dari direktur untuk karyawan, dan masih banyak lagi. Ketika diajukan dalam segi tata bahasa, surat edaran termasuk jenis surat resmi hal ini, disebabkan bahasa yang digunakan menggunakan bahasa resmi, singkat, jelas, dan padat.

⁷ Contoh surat edaran resmi, [http://www.pinhome.id/blog/contoh-surat-edaran-resmi/#:~:text=surat%20edaran%20adalah%20surat%20yang, didalam%20sebuah%20instansi%20atau%20lembaga.&text=didalam%20surat%20ini%20biasanya%20berisi,peraturan%20baru%2C%20dan%20lain%20sebagainya](http://www.pinhome.id/blog/contoh-surat-edaran-resmi/#:~:text=surat%20edaran%20adalah%20surat%20yang, didalam%20sebuah%20instansi%20atau%20lembaga.&text=didalam%20surat%20ini%20biasanya%20berisi,peraturan%20baru%2C%20dan%20lain%20sebagainya.). Pada tanggal 16 desember 2021 pukul 19.30

Macam-macam surat edaran dalam ilmu surat-menyurat, surat edaran dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Surat edaran terbatas

Surat edaran terbatas adalah surat yang dibuat oleh perusahaan/instansi berisi pemberitahuan yang akan diberikan kepada anggota instansi tersebut.

2. Surat edaran tidak terbatas

Surat edaran tidak terbatas merupakan surat pemberitahuan yang diberikan kepada khalayak umum.

fungsi surat edaran adalah untuk menyampaikan atau mengungkapkan suatu hal penting kepada khalayak umum dan bahkan bisa bersifat rahasia.

2.6 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya). Istilah kebijakan dapat diterapkan pada sistem pemerintahan, organisasi, kelompok sektor swasta, dan individu sehingga kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum karena hukum sifatnya memaksakan atau melarang suatu perilaku, sedangkan kebijakan merupakan pedoman tindakan atau kegiatan pemerintah untuk memperoleh hasil yang diinginkan dengan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan serta merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan suatu organisasi, termasuk

identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya sehingga kebijakan dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Menurut Edi Suharto “kebijakan adalah suatu ketepatan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.”⁸

Perlu kita ketahui, mengapa kita harus mengetahui dan memahami setiap kebijakan yang ada. Karena kebijakan tidak bisa dipahami secara tekstual, tetapi banyak sekali hal-hal yang tersembunyi (kontekstual) yang tidak diketahui oleh Publik dalam menetapkan kebijakan. Disinilah peran media sebagai fasilitator untuk transformasi Informasi kepada rakyat. Jika demikian, haruslah setiap media yang ada bersifat independen atau tidak terpengaruh oleh kekuasaan politik tertentu.

Berbagai definisi tentang kebijakan publik yang diungkapkan oleh para ahli, bahwa kebijakan publik itu adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan bersama. Setiap kebijakan publik tentunya mempunyai proses formulasi dan evaluasi yang mengikutinya, semua proses kebijakan publik saling mempengaruhi satu sama lainnya tidak bisa saling melemahkan, tetapi sebaliknya harus saling menguatkan sehingga kebijakan berjalan secara baik dan optimal.

2.7 Teori Implementasi Kebijakan

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan, Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang

⁸ Edi Suharto Dalam Uddin B Sore Dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, Cv Sah Media: Makassar ,2017, Hlm 3.

dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.⁹ Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergitis yang digerakan untuk berkerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki.

Implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas yang paling penting. Tetapi, tidak seperti anggapan sebagian orang bahwa setiap kebijakan itu akan terimplementasikan dengan sendirinya, seolah aktivitas implementasi kebijakan tersebut menyangkut sesuatu yang tinggal jalan. Realita menunjukkan implementasi kebijakan itu sejak awal melibatkan sebuah proses rasional dan emosional yang teramat kompleks. Jadi, bukan sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu. Studi implementasi, mau tak mau akan memasuki ranah permasalahan konflik, keputusan-keputusan yang pelik, dan isu mengenai siapa yang memperoleh apa, berapa banyak dari suatu kebijakan.

Oleh sebab itu, tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Menurut Van Meter Dan Van Horn, diteori ini mereka berajak dari suatu argument bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sikap kebijakan yang akan dilaksanakan.¹⁰ Dari titik ini, kemudian keduanya menawarkan suatu pendekan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi

⁹ Elih Yuliah, "*Implementasi Kebijakan Pendidikan*", Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan, Vol.30 No 2 (2020),133

¹⁰ Van Meter Dan Van Horn Dalam Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara: Jakarta, 2015, Hlm 164.

dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan kinerja (*performance*). Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, control, dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Dalam artian, implementasi pada program-program publik kebanyakan akan berhasil ketika perubahan yang dikehendaki relatif sedikit. Sementara komitmen terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoprasikan program dilapangan, relatif tinggi. Hal lain yang juga dikemukakan oleh kedua ahli diatas ialah jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan kinerja dipisahkan oleh sejumlah variable bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan.

Variable-variabel bebas yang dimaksud ialah:

1. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan

Suatu kebijakan tentu telah menegaskan standar dan tujuan tertentu yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan tujuan tersebut. Karena dijadikan sebagai criteria penilaian maka standar dan tujuan dirumuskan secara spesifik dan kongkret. Menurut van meter dan van horn identifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran dasar dan tujuan kebijakan telah terealisasi. Ukuran-ukuran dasar (standar kebijakan) dan tujuan berguna didalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.

Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan di laksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan. Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dari sasaran-sasaran, kita dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan dari para pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen seperti regulasi-regulasi dan garis-garis pedoman program yang menyatakan criteria untuk evaluasi pencapaian kebijakan. Akan tetapi, dalam beberapa hal ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran kebijakan harus dideduksikan oleh penulis perorangan

dan pilihan ukuran-ukuran pencapaian bergantung pada tujuan-tujuan yang didukung oleh penulis.

2. Sumber daya

Disamping standar dan tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber daya yang tersedia. Kebijakan menuntut tersedianya sumber daya, baik berupa dana maupun perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Dalam praktek implementasi kebijakan, sering kali didengar para pejabat maupun pelaksana mengatakan bahwa kita tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai program-program yang telah direncanakan. Dengan demikian, besar kecilnya dana akan menjadi salah satu faktor menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi

Kejelasan standar dan tujuan tidak menjamin implementasi yang efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antar organisasi dan aktivitas pengukuhan. Semua

pelaksana harus memahami apa yang didealkan oleh kebijakan yang implementasinya menjadi tanggung jawab mereka. Hanya saja komunikasi adalah proses rumit, yang sangat potensial untuk menjadi penyimpangan. Hal ini menyangkut persoalan kewenangan dan kepemimpinan organisasi atasan (superior) mestinya mampu mengkondisikan organisasi bawahan atau pelaksana untuk memiliki idealita sebagaimana yang dikehendaki oleh kebijakan.

4. Karakteristik dari agen pelaksana/implementator

Struktur dari agen pelaksana yang meliputi karakteristik, norma dan pola hubungan yang potensial maupun aktual sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Karakteristik dari badan pelaksana dilihat dari stuktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik norma dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variable selanjutnya sebagaimana dapat diambil inferensi logis dari bagan sistem kebijakan didepan, kondisi sosial, ekonomi dan politik juga berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Ini merupakan implementasi dari perspektif sistemik.

6. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementor

Kesemua variable tadi membentuk sikap pelaksana terhadap kebijakan yang mereka implementasikan, untuk pada akhirnya menentukan seberapa tinggi kinerja kebijakannya. Kognisi, netralitas dan obyektivitas para individu pelaksana sangat berpengaruh bentuk respons mereka terhadap semua variable tersebut. Wujud respons individu pelaksana menjadi

penyebab dari berhasil dan gagalnya implementasi. Jika pelaksana tidak memahami tujuan kebijakan, lebih-lebih apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai

pembuat kebijakan maka implementasi tidak akan efektif. Hal yang sama juga terjadi bila “loyalitas” pelaksana kepada organisasi rendah.

Variabel-variabel kebijakan bersangkutan paut dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya, mencakup antar hubungan didalam lingkungan sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya, pusat perhatian pada sikap para pelaksana mengantarkan kita pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoprasikan program dilapangan.

2.8 kerangka pikir

kerangka pikir adalah acuan di dalam melaksanakan penelitian atau jawaban dari rumusan masalah berdasarkan kajian teori. Dalam bukunya *business research* mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual bagaiman teori berhubungan dengan berbagai faktor yang akan di definisikan sebagai masalah penting.¹¹

Pandemi covid-19 masih mewabah diindonesia namun pemerintah sudah menerapkan masa *new normal* untuk mengembalikan aktifitas masyarakat terutama aktifitas sistem pembelajaran dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Dengan begitu Pemerintah Mengeluarkan Kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri.

Dalam menyikapi situasi masa *new normal* khususnya bagi Penyelenggaraan Pembelajaran, Keputusan Bersama Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor

¹¹ Darmawan Deni. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya. Hal-117.

HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Dimasa Pandemi *Corona Virus Disese 2019* (Covid-19). Keputusan bersama tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 maret 2021, kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi covid-19.

Di Ogan Komering Ulu Timur sudah memberlakukan sekolah tatap muka terbatas dengan Surat Edaran Nomor: 420/567/1.DISDIKBUD.OT/2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Tahun Pembelajaran 2021/2022 Dimasa Pandemi Covid-19. Didalam kebijakan ini terdapat masalah dalam mematuhi protokol kesehatan yang menjadi prioritas utama, contohnya kurangnya partisipasi siswa/siswi disekolah dan masyarakat disekitar sekolah dalam mematuhi protokol kesehatan seperti masih menggunakan masker satu lapis dan tidak menjaga jarak jauh. Dalam hal ini implementasi kebijakan surat keputusan bersama sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga tercapainya kesehatan dan keselamatan melalui kebijakan surat keputusan bersama empat menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pembelajaran dimasa pandemi covid-19.

Bagan 2.1 kerangka pikir



